

ABSTRAK

Bank Tanah sebagai badan baru yang dibentuk oleh Pemerintah sebagai badan sui generis dalam pengaturannya masih menimbulkan beberapa tanda tanya mengenai tugas dan kewenangannya yang salah satu tujuannya adalah untuk menunjang Reforma Agraria. Untuk mengetahui potensi disharmonisasi antara pengaturan mengenai Bank Tanah dan Reforma Agraria dilakukan penelitian mengenai Harmonisasi Pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Bank Tanah Dalam Menunjang Reforma Agraria.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Harmonisasi Pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Bank Tanah Dalam Menunjang Reforma Agraria serta pengaturan Bank Tanah dalam peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Metode pendekatan yang akan digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang akan digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis.

Hasil penelitian yang diperoleh tentang Harmonisasi Pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Bank Tanah Dalam Menunjang Reforma Agraria yaitu pada dasarnya Bank Tanah dalam pengaturannya memiliki salah satu tugas untuk menyediakan tanah yang akan digunakan untuk Reforma Agraria tetapi dalam pengaturannya masih terdapat beberapa hal yang memicu adanya disharmonisasi diantara keduanya dan masih adanya beberapa ketentuan yang belum jelas. Oleh karena itu, hendaknya pemangku kebijakan segera mengatur ketentuan yang belum jelas dan melakukan evaluasi terhadap peraturan Bank Tanah dan Reforma Agraria untuk meminimalisir potensi disharmonisasi diantara keduanya.

Kesimpulan dari penelitian ini terdapat pengaturan yang belum jelas dan detail mengenai penyelenggaraan Bank Tanah serta terdapat potensi disharmonisasi pengaturan antara Bank Tanah dan Reforma Agraria.

Kata Kunci: Disharmonisasi, Bank Tanah, Reforma Agraria

ABSTRACT

The Land Bank, as a new body formed by the Government as a *sui generis* body, still raises several question marks regarding its duties and authority, one of the aims of which is to support Agrarian Reform. To determine the potential for disharmonization between regulations regarding Land Banks and Agrarian Reform, research was conducted regarding Harmonization of Government Regulation Number 64 of 2021 concerning Land Banks in Supporting Agrarian Reform.

This research aims to find out and analyze the Harmonization of Government Regulation Number 64 of 2021 concerning Land Banks in Supporting Agrarian Reform as well as the regulation of Land Banks in other laws and regulations. The approach method that the author will use in writing this law is normative juridical. The research specifications that the author will use in writing this law are analytical descriptive.

The results of the research obtained regarding Harmonization of Government Regulation Number 64 of 2021 concerning Land Banks in Supporting Agrarian Reform are that basically Land Banks in their arrangements have one of the tasks of providing land that will be used for Agrarian Reform but in their arrangements there are still several things that trigger them. disharmony between the two and there are still several unclear provisions. Therefore, policy makers should immediately regulate unclear provisions and evaluate Land Bank and Agrarian Reform regulations to minimize the potential for disharmony between the two.

The conclusion from this research is that there are unclear and detailed regulations regarding the implementation of the Land Bank and there is potential for regulatory disharmony between the Land Bank and Agrarian Reform.

Keywords: Disharmonization, Land Bank, Agrarian Reform